

**TINGKAT INKLUSIVITAS LORONG SEBAGAI RUANG PUBLIK
BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT RENTAN
DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS KELURAHAN BONTO MAKKIO
KECAMATAN RAPPOCINI)**

**ULFAH ICHWANI ACHMAD
P052172001**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERKOTAAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASNUDDIN
MAKASSAR**

2023

**TINGKAT INKLUSIVITAS LORONG SEBAGAI RUANG PUBLIK
BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT RENTAN
DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS KELURAHAN BONTO MAKKIO
KECAMATAN RAPPOCINI)**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Manajemen Perkotaan

Disusun dan diajukan oleh

ULFAH ICHWANI ACHMAD

P052172001

kepada

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERKOTAAAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**TINGKAT INKLUSIVITAS LORONG SEBAGAI RUANG PUBLIK
BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT RENTAN
DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini)**

Disusun dan diajukan oleh:

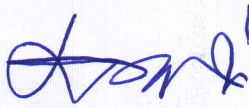
ULFAH ICHWANI ACHMAD
Nomor Pokok : P052172001

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian program studi Manajemen Perkotaan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tanggal 6 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

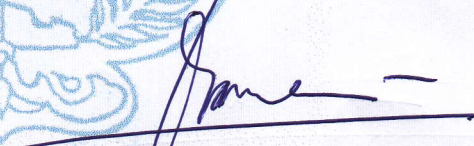
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

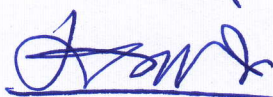


Prof. Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT
NIP: 19630504 1995 12 1 001



Dr. M. Ramli AT., M.Si
NIP: 19660701 1999 03 1002

Ketua Program Studi
Manajemen Perkotaan



Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT
NIP: 19630504 1995 12 1001

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.Med.Ed
NIP: 19661231 199503 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul Tingkat Inklusifitas Lorong Sebagai Ruang Publik Berdasarkan Masyarakat Rentan Di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini) dengan arahan dari komisi pembimbing Prof.DR. Ir. Arifuddin Akil,MT dan DR.M.Ramli AT,M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal IJESCA sebagai artikel dengan judul Tingkat Inklusi Lorong Sebagai Ruang Publik Berdasarkan Masyarakat Rentan Di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini) Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.



Makassar, 10 Januari 2023

ULFAH ICHWANI ACHMAD

P052172001

Ucapan Terima Kasih

Saya bersyukur bahwa tesis ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof.Dr. Arifuddin Akil,MT sebagai pembimbing utama dan Dr.M.Ramli AT,M.Si sebagai pembimbing kedua. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan wilayah kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan penelitian di wilayahnya

Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada kepala Bappeda Kota Makassar dan Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Kota Makassar atas pengertiannya selama saya menjalani pendidikan program studi magister dan juga kepada seluruh teman-teman bidang sosbud Bappeda Kota Makassar atas bantuan dan supportnya kepada saya. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program magister serta para dosen dan rekan-rekan dalam tim penelitian.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta saya mengucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan. Penghargaan yang besar saya sampaikan kepada suami tercinta dr.Aminuddin,MND,Sp.GK,Ph.D dan anak-anak saya Nasywa, Naura dan Auzai dan seluruh keluarga saya atas motivasi, pengorbanan dan dukungan yang tak ternilai.

Penulis,


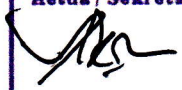
Ulfah Ichwani Achmad

ABSTRAK

ULFAH ICHWANI ACHMAD. *Persepsi Kelompok Rentan terhadap Fungsi Lorong sebagai Ruang Publik yang Inklusif di Kota Makassar. (Studi Kasus Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini)* (dibimbing oleh **Arifuddin Akil** dan **M.Ramli AT**)

Kota harus menyediakan ruang publik yang cukup untuk memelihara interaksi antar penghuninya, Namun saat ini masih banyak ditemui kelompok rentan di masyarakat seperti penyandang disabilitas, anak-anak, maupun lansia belum bisa berperan aktif secara luas di lingkungan sosialnya termasuk ruang publik yang, menjadi salah satu masalah inklusivitas. Salah satu tujuan dari pembangunan di Kota Makassar adalah menjadi kota yang inklusif dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan prinsip *No One Left Behind*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat inklusivitas ruang terbuka publik yang ada di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan *mix methode* deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan isian kuesioner untuk mendapatkan persepsi dan preferensi masyarakat mengenai ruang terbuka publik, sedangkan data sekunder dari telaah dokumen terkait ruang publik. Teknik analisis yang digunakan adalah *Good Public Space Index* (GPSI) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah tingkat inklusivitas ruang terbuka publik di kelurahan Bonto Makkio tergolong kategori sedang atau termasuk cukup inklusif bagi kelompok rentan, baik pada responden anak-anak, disabilitas, dan lanjut usia. Terdapat beberapa fasilitas yang belum maksimal, serta beberapa aspek yang dinilai masih rendah, masih banyaknya fasilitas sarana dan prasarana yang belum ramah disabilitas Aksesibilitas merupakan aspek terendah yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat inklusivitas pada ruang terbuka publik di Kota Makassar.

Kata Kunci : Ruang publik, Inklusivitas, Kelompok Rentan, Kota Makassar


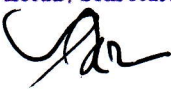
| | |
|---|---|
|  | |
| GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS | |
| Abstrak ini telah diperiksa. | Paraf Ketua / Sekretaris. |
| Tanggal : _____ |  |

ABSTRACT

ULFAH ICHWANI ACHMAD. *Survey Of Perception Of Vulnerable Groups On Public Space Inclusiveness in Makassar City (A Case Study Of Public Space In Bonto Makkio)* (supervised by **Arifuddin Akil** and **M.Ramli AT**)

City space must provide sufficient public space to maintain interaction between its residents. However, there are many vulnerable groups who live in a city, namely persons with disabilities, children and the elderly, who may find it difficult to play an active role in their social environment because of difficulty in accessing or using public spaces. One of the development goals in Makassar City is to become a city that is inclusive and in line with sustainable development goals (SDGs) with the principle of *No One Left Behind*. This study aims to evaluate the level of inclusivity of public open spaces in Bonto Makkio, Rappocini, Makassar City. The research method uses a mix of quantitative and qualitative methods in primary and secondary data collection. Primary data were obtained from observations and questionnaires to obtain public perceptions and preferences regarding public open spaces, while secondary data obtained from local government officials. The inclusiveness analysis used based on the Good Public Space Index (GPSI) principles. The analysis results showed the level of inclusiveness of public open space in Bonto Makkio was moderate category for all the vulnerable groups. There are several facilities that have not been optimally inclusive. The lowest aspect was the accessibility which may play a key role in hindering the vulnerable groups to actively participate in their social environment.

Keywords : *Public Space , Inclusiveness, Vulnerable Groups, City of Macassar,*

| | |
|---|---|
|  GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS | |
| Abstrak ini telah diperiksa. | Paraf Ketua / Sekretaris. |
| Tanggal : _____ |  |

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN PENGAJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 16 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 17 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 18 |
| 1.4 Ruang Lingkup Penelitian | 18 |
| 1.5 Defenisi Operasional..... | 18 |
| 1.6 Sistematika Penelitian..... | 19 |

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

| | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Tinjauan Hasil Penelitian | 21 |
| 2.2 | Teori dan Konsep | |
| | 1. Kelompok rentan masyarakat perkotaan | 22 |
| | 2. Ruang publik | 23 |
| | 3. Peran Ruang publik | 26 |
| | 4. Kriteria keberhasilan ruang publik | 27 |
| | 5. Kota yang inklusif | 27 |
| | 6. Ruang publik yang inklusif | 28 |
| | 7. Studi kelompok rentan | 30 |
| | 8. Pedoman kesetaraan dan inklusifitas | 31 |
| 2.3 | 9. Kerangka Pikir | 43 |

BAB III. METODE HASIL PENELITIAN

| | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | Pendekatan dan Metode Penelitian | 45 |
| 3.2 | Variabel Penelitian | 46 |
| 3.3 | Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| | 3.3.1 Pengumpulan data primer | 48 |
| | 3.3.2 Pengumpulan data sekunder | 51 |
| 3.4 | Populasi dan Sampel | 52 |
| | 3.4.1 Populasi | 52 |

| | |
|---|----|
| 3.4.2 Sampel..... | 52 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 52 |
| 3.6 Analisis Deskriptif dan Analisis Data Kualitatif..... | 53 |
| BAB IV. GAMBARAN UMUM RUANG PUBLIK KELURAHAN BONTO MAKKIO | |
| 4.1 Profil Wilayah Kelurahan Bonto Makkio..... | 56 |
| 4.2 Ruang Publik Kelurahan Bonto Makkio | 58 |
| 4.3 Karakteristik dan Kondisi Lorong Ruang Publik..... | 59 |
| BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1 Karakteristik Kelompok Rentan..... | 68 |
| 5.1.1 Anak-anak..... | 68 |
| 5.1.2. Lanjut usia..... | 70 |
| 5.1.3. Disabilitas..... | 73 |
| 5.2 Persepsi Masyarakat Rentan terhadap Ruang publik Inklusif | |
| 5.2.1 Aksesibilitas | 76 |
| 5.2.2 Aktivitas..... | 79 |
| 5.2.3 Kenyamanan..... | 82 |
| 5.2.4 Keamanan..... | 88 |
| 5.3 Tingkat Inklusifitas ruang publik di kawasan penelitian | 89 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 6.1. Hasil Temuan Penelitian..... | 96 |

| | | |
|-----|-------------------------------|-----|
| 6.2 | Kesimpulan | 96 |
| 6.3 | Rekomendasi | 97 |
| 6.4 | Keterbatasan Penelitian | 97 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 98 |
| | LAMPIRAN | 101 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Type ram..... | 33 |
| Gambar 2.2 | Kemiringan ram | 33 |
| Gambar 2.3. | Handrail | 34 |
| Gambar 2.4 | Penempatan pohon, rambu dan street furniture..... | 35 |
| Gambar 2.5. | Prinsip perencanaan jalur pedestrian | 36 |
| Gambar 2.6. | Type tekstur ubin | 37 |
| Gambar 2.7 | Susunan ubin pemnadu belokan | 38 |
| Gambar 2.8 | Tata letak uriner..... | 39 |
| Gambar 2.10 | Perletakan rambu sesuai jarak | 41 |
| Gambar 2.11 | Kerangka pikir..... | 44 |
| Gambar 3.1 | Sequntial eksplanatory | 46 |
| Gambar 4.1 | Peta wilayah kelurahan Bonto Makkio..... | 56 |
| Gambar 4.2 | Peta spasial kelurahan Bonto Makkio | 59 |
| Gambar 4.3 | Fungsi bangunan | 60 |
| Gambar 4.4 | Peta guna lahan..... | 61 |
| Gambar 4.5 | Taman area bermain | 62 |
| Gambar 4.6 | Pedesterian | 63 |

| | | |
|-------------|--|----|
| Gambar 4.7 | Jalan pedestrian lorong | 63 |
| Gambar 4.8 | Pedestrian sebagai tempat parkir..... | 64 |
| Gambar 4.9 | Rumah Ibadah | 64 |
| Gambar 4.10 | Lapangan olahraga..... | 65 |
| Gambar 4.11 | Lampu jalan | 66 |
| Gambar 4.12 | Ruang terbuka hijau lorong | 66 |
| Gambar 4.13 | Penghijauan lorong..... | 67 |
| Gambar 5.1 | Grafik kendala aksesinlitas | 78 |
| Gambar 5.2 | Grafik persepsi penilaian aksesibilitas..... | 79 |
| Gambar 5.3 | Grafik penilaian aktivitas yang dilakukan..... | 80 |
| Gambar 5.4 | Grafik frekuensi partisipasi | 82 |
| Gambar 5.5 | Grafik tingkat kenyamanan | 83 |
| Gambar 5.6 | Grafik Durasi waktu di ruang publik | 84 |
| Gambar 5.7 | Grafik Fasilitas umum yang layak..... | 85 |
| Gambar 5.8 | Grafik Fasilitas yang perlu ditingkatkan | 86 |
| Gambar 5.9 | Tingkat kenyamanan | 87 |
| Gambar 5.10 | Upaya meningkatkan kenyamanan | 88 |
| Gambar 5.11 | Tingkat kemanan | 89 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian terdahulu | 21 |
| Tabel 2.2 Variabel dan indikator kebutuhan ruang publik | 27 |
| Tabel 2.3 Prinsip universal design..... | 42 |
| Tabel 3.1 Konsep operasional variabel | 46 |
| Tabel 3.2 Penilaian persepsi kelompok rentan..... | 50 |
| Tabel 3.3 Interpretasi skor presentasi | 51 |
| Tabel 3.4 Indeks ruang publik..... | 53 |
| Tabel 3.5 Metode pengumpulan data..... | 54 |
| Tabel 4.1 Deskripsi wilayah kelurahan Bonto Makkio | 57 |
| Tabel 4.2 Jumlah penduduk | 57 |
| Tabel 4.3 Sarana dan prasarana kelurahan Bono Makkio | 58 |
| Tabel 4.4 Ruang publik kelurahan Bonto Makkio | 58 |
| Tabel 5.1 Responden anak terhadap jenis kelamin | 68 |
| Tabel 5.2 Responden anak terhadap umur..... | 69 |
| Tabel 5.3 Responden anak terhadap pendidikan..... | 69 |
| Tabel 5.4 Responden lansia terhadap jenis kelamin..... | 70 |
| Tabel 5.5 Responden lansia terhadap jenis umur..... | 70 |
| Tabel 5.6 Responden lansia terhadap jenis pendidikan..... | 71 |
| Tabel 5.7 Responden lansia terhadap jenis pekerjaan | 72 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 5.8 | Responden lansia terhadap jenis penghasilan..... | 72 |
| Tabel 5.9 | Responden disabilitas jenis kelamin..... | 73 |
| Tabel 5.10 | Responden disabilitas umur | 74 |
| Tabel 5.11 | Responden disabilitas berdasarkan pendidikan | 74 |
| Tabel 5.12 | Responden disabilitas berdasarkan pekerjaan..... | 75 |
| Tabel 5.13 | Responden disabilitas berdasarkan pendapatan | 75 |
| Tabel 5.14 | Moda transportasi | 76 |
| Tabel 5.15 | Alasan memilih moda transportasi | 76 |
| Tabel 5.16 | Bantuan mengakses ruang publik | 77 |
| Tabel 5.17 | Kendala aksesibilitas | 77 |
| Tabel 5.18 | Penilaian aksesibilitas..... | 78 |
| Tabel 5.19 | Aktivitas yang dilakukan | 80 |
| Tabel 5.20 | Aktivitas sosial | 81 |
| Tabel 5.21 | Frekuensi partisipasi..... | 81 |
| Tabel 5.22 | Tingkat kenyamanan | 82 |
| Tabel 5.23 | Durasi waktu penggunaan..... | 83 |
| Tabel 5.24 | Fasilitas umum yang layak | 84 |
| Tabel 5.25 | Fasilitas yang perlu ditingkatkan | 85 |
| Tabel 5.28 | Tingkat keamanan | 88 |
| Tabel 5.29 | Kriteria pengukuran tingkat inklusivitas | 94 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan perkotaan inklusif (*inclusive urban development*) telah menjadi isu yang penting dalam pembangunan perkotaan. Pembangunan perkotaan selama ini lebih bertumpu pada tujuan pertumbuhan ekonomi namun sering melupakan aspek pendekatan pembangunan yang bertumpu pada manusianya (*people - centered approach of development*). Pembangunan inklusif digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah kota dengan lingkungan yang semakin terbuka dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan dan status, kondisi ,etnik dan budaya yang berbeda dan secara fisik mereka memperoleh akses terhadap layanan dasar bagi kehidupan (Maftuhin, 2017). Salah satu unsur penting dalam sebuah perkotaan adalah ruang publik, dimana ruang publik merupakan salah satu elemen dalam membentuk suatu kehidupan masyarakat di perkotaan dan merupakan tempat terjadinya ikatan sosial dalam kehidupan perkotaan (Bishop dan Marshall 2017). Pentingnya ruang terbuka publik dalam suatu wilayah juga dijelaskan dalam *Leipzig Charter on Sustainable European Cities (2007)* bahwa kualitas ruang publik, menjadi salah satu yang memainkan peran penting dalam kondisi kehidupan perkotaan.

Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 menempatkan 6 goals dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang membahas masalah inklusi sosial sementara goals yang lain mendukung inklusi sosial. Salah satu sasaran yang secara eksplisit dijabarkan pada tujuan 11 yaitu pada tahun 2030, kota harus menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau, terutama untuk perempuan, anak-anak, lansia dan disabilitas. Hal ini juga sesuai dengan *New Urban Agenda (Carmona, 2019)* yang berbunyi salah satunya kota harus memenuhi fungsi sosialnya, termasuk akses yang setara untuk semua dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas serta memprioritaskan ruang publik yang aman, inklusif, mudah di akses, hijau dan berkualitas yang ramah untuk semua dan mendorong terjadinya interaksi sosial dan lintas generasi.

Pemerintah Kota Makassar yang juga saat ini menuju sebagai kota yang inklusif melakukan perencanaan pembangunan yang dimulai dari lorong. Kenapa Lorong karena sebagian besar penduduk kota Makassar bermukim di lorong dengan berbagai macam latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Lorong adalah area permukiman dengan lahan yang sempit, padat penduduk dan bangunan yang saling berdekatan dan terdiri dari jalan lingkungan yang memiliki

lebar sekitar 1-4 meter yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya, hal ini menyebabkan sebagian lorong tidak memiliki ruang publik yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Keterbatasan lahan yang ada dalam Lorong menjadikan fungsi Lorong selain sebagai permukiman juga berfungsi sebagai ruang publik dimana masyarakat biasanya beraktivitas sepanjang hari, baik yang digunakan sebagai jalur sirkulasi jalan, sebagai tempat area bermain anak-anak, tempat rekreasi dan hiburan serta sebagai lahan ruang terbuka hijau. (Pallawa et al., 2014)

Jumlah Lorong yang ada di Kota Makassar sekitar 7520 yang sebagian besarnya memiliki kondisi yang kumuh dan masyarakatnya hidup dalam kondisi yang tidak sehat, dengan kemampuan adaptasi terhadap teknologi sangat terbatas. Pemerintah Kota Makassar sendiri memiliki visi 'Menjadikan Kota Makassar sebagai kota dunia yang sombere dan smartcity dengan imunitas kuat untuk semua' dimana salah satu misinya adalah menjadikan sebagai Makassar Kota Inklusif. Pemerintah Kota Makassar menjadikan Lorong sebagai focus utama dalam perencanaan pembangunan, mengingat masyarakat yang bermukim dilorong sebagian besar adalah masyarakat rentan baik kelompok difabel, lanjut usia dan anak-anak. Untuk itu diharapkan pemerintah hadir untuk bisa memberikan pelayanan dasar untuk semua sehingga tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada Goals 11 bisa terwujud dengan prinsip *no one left behind*.

Kondisi lorong sebagai permukiman warga diharapkan bisa menjadi ruang publik yang inklusif baik dari segi infrastruktur, sosial serta sarana dan prasarana seperti halnya di Kelurahan Bonto Makkio, mengingat kawasan lorong ini memiliki banyak fasilitas sarana dan prasarana serta juga menjadi salah satu lorong yang terbaik di Kota Makassar, dengan sering menjadi perwakilan disetiap lomba lorong baik itu program lorong sehat, lorong garden dan program lainnya yang menjadikan lorong di Bonto Makkio selalu menjadi terbaik. Oleh karena hal tersebut peneliti ingin mengetahui apakah di lorong Bonto Makkio yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai ruang publik serta mendapatkan berbagai intervensi dari program pemerintah sudah merupakan lorong yang inklusif untuk semua artinya lorong yang mudah diakses oleh siapa pun, baik untuk kegiatan aktivitas fisik, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi terutama untuk masyarakat rentan baik itu disabilitas, perempuan, lansia, anak dan lainnya.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik dan kondisi lorong sebagai ruang publik di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini
2. Bagaimana persepsi masyarakat kelompok rentan terhadap fungsi lorong sebagai ruang

publik yang inklusif

3. Bagaimana tingkat inklusivitas lorong pada ruang publik di kelurahan Bonto Makkio

I.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui karakteristik dan kondisi Lorong sebagai ruang publik di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini
2. Untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat kelompok rentan terhadap fungsi Lorong sebagai ruang publik yang inklusif
3. Untuk mengidentifikasi tingkat inklusivitas ruang publik pada Lorong di kawasan permukiman kota Kel. Bonto Makkio

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu terkait pembangunan kota inklusif khususnya di Kota Makassar yang diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan terkait pembangun inklusif selanjutnya.

I.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini dibagi atas ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi

a. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini berada di wilayah Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini. Lokasi ini terpilih karena merupakan lokus intervensi dari beberapa program pemerintah terkait Lorong Sehat, Lorong Garden dan Lorong Wisata

b. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi bertujuan untuk membatasi pembahasan yang hanya terfokus pada subjek penelitian. Subyek penelitian adalah golongan masyarakat rentan (Lansia, Anak-anak dan Disabilitas) yang hidup di lokasi yang akan diteliti.

I.5 Defenisi Operasional

Adapun uraian definisi penting dari kumpulan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda yang meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya.

2. Kelompok Rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterlambatan dalam menikmati standar kehidupan layak atau populasi yang hidup dalam kemiskinan tanpa akses yang layak baik pemukiman, air, sanitasi dan nutrisi serta mereka yang distigmatisasi, didiskriminasi dan dimarginalisasi oleh masyarakat bahkan didiskriminalisasi dalam kebijakan hukum negara. Kelompok rentan terdiri dari penyandang disabilitas, Lansia, perempuan, anak-anak, orang miskin, pengungsi, masyarakat adat dan pekerja migran (Ranham 2015-2019)
3. Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengelola, menyimpan dan menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan melalui panca indera (Wagner dan Hollenbeck 1995:136)
4. Lorong adalah jalan kecil yang terdiri dari rumah kiri-kanan disepanjang jalan. Di sepanjang Lorong banyak orang berjualan (Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI)
5. Lorong Garden adalah Program Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan penghijauan kota melalui intensifikasi pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Makassar serta bertujuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis seperti cabai (Wisneni et al., 2021)
6. Lorong Sehat adalah pembinaan kesadaran kesehatan melalui manajemen monitoring terpadu melalui pendekatan ruang (Lorong) dengan berbasis inisiasi dan partisipasi masyarakat (Nurlina & Risma, 2017)
7. Lorong wisata adalah adalah program pemerintah Kota Makassar yang bertujuan menggali dan mempromosikan potensi lorong masing-masing untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjadi tempat destinasi wisatawan baik asing maupun lokal wisata Lorong yang dalam pelaksanaannya melalui kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang isi proposal ini, penulis menyajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah studi dan materi serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian kedua akan membahas tentang rujukan teori dan materi yang berhubungan/memperkuat pengambilan keputusan/interpretasi dan identifikasi terhadap data dan analisa yang akan

dilakukan. Serta membahas tentang penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai literasi dan pembandingan agar penelitian ini kayaakan konsep, prinsip atau teori untuk digunakan dalam pemecahan masalah.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ketiga menjelaskan tentang jenis, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Merupakan bab penjabaran hasil peneltian. Bab hasil penelitian menguraikan output dari penggunaan metodologi dan formula yang dirancang pada bab sebelumnya.

BAB V Kesimpulan

Penutup: merupakan bab penutup yang terbagi atas kesimpulan dan Saran. Pada Bab ini Peneliti memaparkan Kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat hasil penelitian dan pembahasan serta merupakan hasil pengujian hipotesis atau pencapaian tujuan penelitian. Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian yang telah diuraikan dengan tata urutan yang sistemati

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil dari peneeneliti dan tidak sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Keaslian penelitian ini ini ditunjukkan dengan melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya, dimana beberapa mungkin ada yang sama dalam hal tema tetapi metode dan alur penelitian yang berbeda.

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul | Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | Hasil |
|--|---|--|---|---|
| Nasrudin Dewang, Jurusan Teknik Planologi Universitas Esa Unggul Jakarta | Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel di Kawasan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat | Merumuskan prinsip-prinsip perancangan ruang terbuka publik kota yang mempertimbangan kebutuhan aksesibilitas agar dapat dinikmati oleh kaum difabel | Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif | Upaya yang dilakukan di Kawasan Taman Suropati Menteng terkait aksesibilitas adalah melakukan penyusunan peraturan terkait akses bagi kaum difabel dan perlu meningkatkan informasi bagi pemerintah/aparat tentang difabel dan kriterianya bukan hanya difabel melainkan lansia, perempuan dan kelompok rentan lainnya. |
| Khairunnisal l'Alamin, Byna Kameswara | Inklusivitas Ruang Publik Berdasarkan Persepsi Pengunjung (Studi Kasus : | Untuk memperhatikan karakteristik ruang publik yang inklusif agar dapat | Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan | Berdasarkan hasil penelitian bahwa lapangan Gasibu, Taman Lansia dan Jalur Pedesterian merupakan |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | Lapangan Gasibu, Taman Lansia dan Jalur Pedestrian jalan Ir. H.Djuanda | menhadapi dinamika dan isu permasalahan sosialnya sebagai Kawasan perkotaan | kualitatif (Mix Method) | ruang publik yang inklusif |
| Muhammad Fuad Chakam, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Volume 19 | Kebutuhan Elemen Desain Jalan yang Inklusif di Kampung Pelangi Semarang berdasarkan Aspek Kenyamanan | Merumuskan kebutuhan elemen desain jalan yang inklusif di Kampung Pelangi | Menggunakan Mix Method dengan mengkombinasikan metode kualitatif dan metode kuantitatif | Kebutuhan elemen desain yang disampaikan berbeda tergantung dari kebutuhan penggunaan jalan seperti penduduk anak-anak dan wisatawan menilai lebih membutuhkan elemen desain yang inklusif yaitu jalan yang bersih pada semua jalan agar anak-anak lebih nyaman dalam melakukan aktivitasnya |

Sumber : Hasil analisis 2022

2.2 Teori dan Konsep

1. Kelompok rentan masyarakat perkotaan

Deklarasi New Urban Agenda oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan salah satu visi penting terkait bagaimana membangun perkotaan/kota di masa depan (Dick, 2016) *Cities for all*, yang berarti pemamfaatan dan penikmatan yang sama (equal use and enjoyment) kota dan wilayah pemukiman yang mendorong inklusivitas untuk memastikan semua penduduk generasi sekarang dan yang akan datang tanpa diskriminasi apapun bentuknya, dapat tinggal dan menghasilkan kota-kota dan wilayah pemukiman yang adil, aman, sehat, *accessible*, terjangkau, *resilient*, dan *sustainable* untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup bagi semua. Kota-kota yang diharapkan tercipta di masa depan adalah yang memenuhi fungsi sosialnya, partisipatif,

mencapai persamaan gender dan pemberdayaan wanita, mampu memenuhi tantangan dan kesempatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan *sustainable*, dan memenuhi fungsi territorial sebagai pusat/hub pembangunan seimbang dan terintegrasi yang lintas-administrasi, mampu mengembangkan perencanaan dan investasi yang responsif usia dan gender, mampu mengadopsi dan mengimplementasikan manajemen resiko bencana, dan mampu menjaga ekosistem, sumber air, habitat alamiah, dan biodiversitas. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang di dalamnya termasuk pembangunan kota yang inklusif merupakan bagian yang integral dari *Sustainable Development Goal (SDG) -11* (Kustiwan & Ramadhan, 2019)

Ada banyak definisi kelompok rentan perkotaan. Secara umum mereka yang lebih beresiko terhadap keadaan/lingkungan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat seperti terjadinya penyakit, bencana alam, dan berbagai kondisi sosial ekonomi yang rendah. Akses ke infrastruktur fisik, ekonomi, Kesehatan, pendidikan dan sosial yang rendah juga merupakan ciri yang lain. Kelompok rentan ini karena berbagai hal kurang mampu beradaptasi dan mengatasi berbagai kondisi tidak menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat (Satterthwaite, D.)

Kelompok rentan (*vulnerable groups or people in vulnerable situations*) menurut *New Urban Agenda* adalah: anak-anak, remaja, orang dengan disabilitas, orang dengan HIV-AIDS (ODHA), orang tua, orang asli (*indigenous people*), pengungsi, dan migran dan kelompok masyarakat miskin. semua kelompok rentan tersebut akan mengalami resiko yang lebih tinggi mengalami bahaya (*hazards*) terhadap dampak perubahan lingkungan fisik, biologis, sosial dan ekonomi yang terjadi di perkotaan jika tidak dimitigasi dengan baik dengan melakukan perencanaan dan pembangunan kota secara berkelanjutan dan inklusif. Yang mengkhawatirkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Studi Hsu (Hsu et al., 2020) yang menggunakan *Urban Environment and Social Inclusion Index (UESI)* di kota-kota besar dunia, menunjukkan bahwa mayoritas kelompok masyarakat yang terbebani oleh pembangunan dengan indeks yang rendah adalah mereka yang berpenghasilan rendah.

2. Ruang publik

Ruang publik memiliki arti setiap ruang dalam suatu kota dimana siapapun dalam kota tersebut memiliki akses secara bebas untuk memanfaatkan, dan mengoptimalkan kebergunaan ruang tersebut demi mewujudkan sosok kota yang lebih hidup dan manusiawi. Pengertian ruang publik telah ditafsirkan oleh beberapa para ahli dengan berbagai pembahasan yang berbeda, tergantung dari sudut pandang pembahasan tentang ruang publik tersebut. Beberapa pengertian tersebut antara lain:

1. Ruang publik adalah tempat atau ruang yang terbentuk oleh kebutuhan akan tempat untuk bertemu ataupun bersosialisasi. Dengan kata lain, ruang publik dapat diartikan sebagai

suatu wadah yang mampu menampung kegiatan tertentu oleh manusia, baik secara individu maupun berkelompok (Hakim, 2003).

2. Ruang publik berperan sebagai nodes (titik-titik strategis atau penghubung) dan landmark (titik pengenalan) yang menjadi media untuk melakukan navigasi di dalam sebuah kota (Lynch & Banerjee, 1977)
3. Dalam perencanaan kota, ruang publik secara historis telah dideskripsikan sebagai "ruang terbuka", yang berarti jalan, taman dan area rekreasi, plaza dan lain-lain yang dimiliki dan dikelola secara publik di area outdoor (Tonnelat, 2010). (Amalia et al., 2021)

Sedangkan secara tipologi Carmona et al. (2003) menjelaskan bahwa ruang publik memiliki dua sudut pandang yang dapat digunakan sebagai pembeda atau pengelompokan jenis-jenis ruang publik tersebut, yaitu dari segi lingkup atau cakupan dan dari segi fungsi. Apabila ditinjau dari segi lingkup atau cakupan (Carmona, 2019) ruang publik memiliki beberapa tipologi antara lain:

1. External publik space, berbentuk ruang luar/eksternal yang mudah untuk diakses oleh semua orang. Contoh ruang publik tersebut adalah jalur pejalan kaki, alun-alun, taman kota, dan sebagainya.
2. Internal publik space, berbentuk fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat secara bebas tanpa persyaratan tertentu, seperti kantor polisi, kantor pos, rumah sakit dan beberapa pusat pelayanan masyarakat lainnya.
3. External and internal (quasi) publik space, berbentuk fasilitas umum yang rata-rata dikendalikan oleh sektor privat dan terdapat batasan atau persyaratan yang diberikan bagi masyarakat pengguna, seperti mall, café, pusat perbelanjaan, restoran dan lainnya.

Sudut pandang yang kedua yaitu apabila ruang publik ditinjau dari segi fungsi, maka secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tipologi (Carmona et al., 2008:62), antara lain:

1. *Positive publik space*, merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas bersifat positif dan rata-rata dikelola oleh pemerintah. Bentuk aplikasi dari jenis ruang ini seperti ruang alami atau semi alami, ruang publik dan ruang terbuka publik.
2. *Negative publik space* merupakan ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas secara optimal karena terdapat fungsi yang tidak sesuai dengan kaidah kenyamanan dan keamanan dalam melakukan aktivitas sosial, serta terdapat kondisi yang menunjukkan pengelolaan tidak dilakukan dengan baik. Bentuk dari ruang ini adalah ruang servis, ruang pergerakan atau sirkulasi, dan ruang-ruang yang tidak berfungsi dengan baik karena proses perencanaan yang kurang baik.

3. *Ambiguous publik space*, merupakan ruang yang dimanfaatkan untuk aktivitas peralihan dari kegiatan utama masyarakat yang pada umumnya berbentuk seperti ruang bersantai di pertokoan, ruang rekreasi, rumah peribadatan, café, dan sebagainya.
4. *Private publik space*, merupakan ruang yang secara privat dimiliki oleh warga, pada umumnya berbentuk ruang terbuka privat, pekarangan rumah dan ruang dalam suatu bangunan.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian ruang publik yang telah ditinjau, dapat disimpulkan bahwa ruang publik suatu kota memiliki peran sebagai wadah bagi masyarakat umum untuk beraktivitas, namun aktivitas tersebut dapat berjalan optimal atau tidak tergantung bagaimana perencanaan dan perancangan yang diberikan terhadap ruang publik tersebut. Selain itu ruang publik dalam sebuah kota juga dapat diaplikasikan sebagai petunjuk atau pengarah bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan, dengan kemampuan memberikan pengalaman ruang dan karakter yang berbeda sehingga mempermudah bagi masyarakat untuk mengenal struktur ruang kota.

Dalam salah satu proyek yang dilakukan oleh *Unhabitat*, sebuah organisasi yang bergerak dalam pengembangan kesejahteraan kota di dunia, disebutkan bahwa ruang publik berperan sebagai penunjang kesejahteraan sebuah kota. Ruang publik perkotaan dibutuhkan untuk mempertahankan produktivitas kota, kohesi dan inklusi sosial, identitas, dan kualitas hidup. Kecepatan urbanisasi yang tidak terkendali menciptakan pola pemukiman yang tidak teratur dengan persebaran ruang publik yang rendah. Dampak tersebut terlihat pada kota di negara berkembang yang mudah mengalami krisis jumlah ruang publik

Menurut Carr, et al (1992:19) dalam Anita, et al (2013) terdiri dari tiga peringkat utama untuk ruang publik, yaitu:

1. Tanggap (*responsive*), berarti bahwa ruang tersebut dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan para penggunanya.
2. Demokratis (*democratic*), berarti bahwa hak para pengguna ruang publik tersebut terlindungi, pengguna ruang publik bebas berekspresi dalam ruang tersebut, namun tetap harus memperhatikan batasan tertentu karena menggunakan ruang perlu ada toleransi diantara para pengguna ruang.
3. Bermakna (*meaningful*), berarti meliputi adanya ikatan emosional antara ruang tersebut dengan kehidupan para penggunanya.

3. Ruang terbuka publik

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endem) maupun produksi guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa pantai, permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.

4. Peran ruang publik

Idealnya ruang terbuka publik dapat berperan secara baik jika mengandung unsur antara lain: comfort, relaxation, passive engagement, active engagement, discovery. (Carr, et al (1992) dalam Anita, et al (2013)

1. Kenyamanan (*Comfort*), merupakan salah satu syarat wajib keberhasilan ruang terbuka publik. Durasi lama tinggal seseorang berada di ruang terbuka publik dapat dijadikan tolok ukur tingkat kenyamanan suatu ruang terbuka publik. Dalam hal ini kenyamanan ruang terbuka publik antara lain dipengaruhi oleh: aspek lingkungan berupa perlindungan dari pengaruh alam seperti sinar matahari, angin; kenyamanan fisik yang berupa ketersediannya fasilitas penunjang yang cukup seperti tempat duduk; sosial dan kenyamanan dari segi psikologi
2. Relaksasi (*Relaxation*), merupakan aktifitas yang erat kaitannya dengan kenyamanan psikologi. Suasana rileks mudah dicapai jika badan dan pikiran dalam kondisi sehat dan senang. Kondisi ini dapat dibentuk dengan menghadirkan unsur-unsur alam seperti tanaman/pohon, air dengan lokasi yang terpisah atau terhindar dari kebisingan dan hiruk pikuk kendaraan di sekelilingnya.,
 - a. Aktivitas pasif (*Active engagement*), suatu ruang terbuka publik dikatakan berhasil jika dapat mewadahi aktifitas kontak/interaksi antar anggota masyarakat (teman, famili atau orang asing) dengan baik
 - b. Pengalaman (*Discovery*), merupakan suatu proses mengelola ruang terbuka publik agar di dalamnya terjadi suatu aktifitas yang tidak monoton. Aktifitas dapat berupa acara yang diselenggarakan secara terjadwal (rutin) maupun tidak terjadwal diantaranya berupa

konser, pameran seni, pertunjukan teater, festival, pasar rakyat (bazaar)

5. Kriteria keberhasilan ruang publik

Berdasarkan penelitian-penelitian mengenai ruang publik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada kriteria yang memiliki kesamaan satu dengan lainnya. Kriteria tersebut adalah:

1. Aksesibilitas, *Project for Publik Spaces*, 2004, menyatakan bahwa akses merupakan hal utama untuk keberhasilan ruang terbuka publik, yaitu kemudahan ruang terbuka publik untuk didatangi dan mudah dilihat. (Carr et al., 1993) menyatakan ruang terbuka publik haruslah demokratis, ruang tersebut dapat diakses semua golongan, mudah diakses secara fisik maupun visual. Miller (2009), menyatakan bahwa ruang tersebut aman, yang ditandai dengan mudahnya penglihatan dari luar ataupun ke dalam taman, mudah didatangi, terbuka
2. Kesenangan dan menarik pengguna, Carr et al (1992) menyatakan ruang publik haruslah responsif, yaitu dapat menjawab kebutuhan pengguna dalam hal ini aktivitas aktif dan pasif yang dapat memberikan kesenangan. *Project for Publik Spaces* (2004) menjadikan aktivitas dan penggunaan menjadi kriteria ruang terbuka publik yang berhasil, tentunya dengan adanya aktivitas maka ruang tersebut dapat memberikan kesenangan dan menarik pengguna. Miller (2009) menyatakan ruang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengunjungnya dalam beraktivitas yang dapat memberikan kesenangan.

Keamanan dan kenyamanan, Miller (2009), ruang publik haruslah aman, dengan amannya sebuah ruang maka ruang tersebut dapat terus dikunjungi dan berfungsi dengan baik. Carr et al (1992) menyatakan ruang publik haruslah responsif yaitu dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. *Project for Publik Spaces* (2004), menjadikan kenyamanan sebagai kriteria yang penting bagi sebuah ruang, ruang yang nyaman ditandai dengan ruang yang bersih dan aman

6. Kota yang inklusif (*Inclusive City*)

Proyek *inclusive cities* yang dikawal oleh world bank menyebutkan tiga faktor penting dalam membangun sebuah kota yang inklusif (*Inclusive Cities*, 2015)

1. *Spatial inclusion* atau inklusi ruang (fisik) yang meliputi tersedianya infrastruktur seperti perumahan yang layak huni, air bersih dan sanitasi
2. *Social inclusion* atau inklusi sosial, dimana sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk kelompok marjinal karena eksklusi terhadap mereka menyebabkan ketimpangan dan kerusuhan sosial di beberapa wilayah perkotaan

3. Economic inclusion atau inklusi ekonomi. Kota Inklusif harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warganya untuk mendapatkan hak dalam memperoleh pekerjaan

Konsep kota inclusive di Indonesia selalu terkait dengan pemenuhan hak-hak difabel padahal terkait inklusif banyak hal baik itu inklusivitas ras, etnis atau agama. Untuk *social exclusion* menurut (Sheppard, 2006) kelompok yang dapat tereksklusi secara sosial antara lain kelompok miskin, pengangguran, kelompok yang terputus dari relasi sosialnya. Untuk membangun sebuah kota yang inklusif tidak cukup hanya menggunakan satu pendekatan saja karena akan melahirkan sebuah kebijakan yang parsial dan komprehensif, tetapi dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan integratif yang mendengarkan berbagai permasalahan penting.

7. Ruang publik inklusif

Ruang publik, secara alami, inklusif secara sosial dan pluralis (Tiesdell dan Oc, 1998). Ruang publik inklusif dapat didefinisikan dengan memiliki empat kualitas akses yang saling mendukung yaitu : akses fisik, akses sosial, akses ke kegiatan dan diskusi atau komunikasi, akses ke informasi. Ruang publik yang inklusif adalah tempat di mana kegiatan dan diskusi dalam proses pengembangan dan penggunaannya terbuka untuk semua dan proses pengembangan ruang publik idealnya harus dapat diakses oleh semua orang. Kualitas keempat akses memungkinkan untuk mendefinisikan ruang publik inklusif sebagai tempat di mana informasi mengenai pengembangan dan proses penggunaannya tersedia untuk semua anggota masyarakat. Mengenai empat kualitas dari akses, tingkat inklusivitas ruang publik tergantung pada sejauh mana ruang publik, secara fisik dan sosial, terbuka untuk semua golongan masyarakat dan aktivitas yang terjadi dalamnya, penggunaannya dapat diakses oleh semua orang. Graham Murdock (199) mengemukakan sebuah teori dan mengidentifikasi hak yang ada dari sebuah ruang publik

1. Hak mendapatkan informasi
2. Hak mendapatkan pengalaman
3. Hak mendapatkan pengetahuan
4. Hak untuk berpartisipasi

Menurut Keputusan MENPAN nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan serta memberikan akses khusus berupa kemudahan bagi pelayanan kelompok rentan, disabilitas, lansia, Wanita hamil, dan balita.

Tabel 2.2 Variabel dan Indikator Kebutuhan dalam Ruang Publik

| Variabel | Indikator | Parameter |
|--------------------|--|---|
| Kenyamanan | Rasa nyaman | Seberapa lama pengguna menggunakan ruang publik |
| | Tingkat kenyamanan | Faktor lingkungan (cuaca, angin sinar matahari) |
| | Kenyamanan fisik | Penyediaan fasilitas yang memadai |
| | Kenyamanan sosial - psikologis | Suasana tempat yang tenang dan aman |
| Relaxation | Elemen Ekologis | Pepohonan, tumbuh-tumbuhan, fitur ier yang memudahkan seseorang untuk bersantai |
| Passive Engagement | Kebutuhan untuk menikmati lingkungan sekitar tanpa terlibat interaksi langsung | View yang menarik, pertunjukan, aktivitas orang sekitar dll |
| Akptive Engagement | Interaksi sosial | Kontak langsung dengan orang sekitar |
| Discovery | Keinginan akan mencoba pengalaman baru yang disediakan dslm sebuah tempat | Konser, pameran seni, aktivitas kemasyarakatan yang biasanya bersifat musiman dll |

Sumber : Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam *The Project for Publik Space (2008)* terdapat beberapa atribut yang harus diperhatikan baik :

1. Comfort and Image
2. Acces and Linkage
3. Uses and Activitu
4. Socialbility

Ruang publik menawarkan berbagai kemungkinan kontak sosial dan meningkatkan pertumbuhan pribadi (Sennett,1971). Trdapat lima indicator dari ruang publik yang diperlukan dalam mengukur kualitas ruang publik yaitu

1. Inklusivitas

Ruang publik tidak pernah sepenuhnya inklusif, tetapi setidaknya dapat di akses dengan layak meskipun ruang tersebut tidak akan pernah mendukung semua kegiatan orang dari semua lapisan masyarakat

2. Aktivitas

Suatu tempat dimana ruang menjadi bermakna ketika berguna dan mendukung kegiatan bagi individu tau kelompok dan sosialisasi

3. Keamanan

Keselamatan merupakan masalah utama dalam ruang publik khususnya kelompok yang termarjinalkan atau kelompok rentan

4. Kenyamanan

Kenyamanan juga menjadi hal utama baik kenyamanan fisik maupun lingkungan, Indeks ruang publik berfungsi untuk mengukur tingkat kenyamanan fisiologis yang disediakan ruang publik

5. Kesenangan

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana sehingga memberikan kenyamanan dan hal yang menyenangkan bagi pengguna ruang publik

Menurut Permen PU No.30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. bagi kaum difabel dengan adanya standar teknis penyediaan fasilitas prasarana dan sarana aksesibilitas dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi ruang sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat dicapai.

8. Studi-studi kelompok rentan perkotaan

Pembangunan yang inklusif berhubungan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan setidaknya dari berbagai visi pembangunan yang ingin diwujudkan oleh berbagai badan/*agencies* pendonor serta pemerintahan nasional berbagai negara. Asian Devepment Bank (ADB) yang ikut membiayai berbagai proyek di pemukiman kumuh di Indonesia, menegaskan berbagai elemen kunci dalam pembangunan yang inklusif seperti pembangunan infrastruktur lingkungan kota,

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kebijakan pengurangan kemiskinan (Asian Development Bank, 2011). Studi-studi terkait kelompok rentan dan hubungannya dengan pembangunan yang inklusif di Kota Makassar masih sangat jarang dilaporkan. Muhammad Arifin (Arifin et al., 2020) dengan memakai *spatial analysis* dan *Walkability Index* melaporkan bahwa hanya 3% dari perumahan (n=277) yang memiliki pedestrian. Pedestrian yang ada tersebut memiliki *Walkability Index* yang baik. Nur Khaerah (Khaerah et al., 2021) menunjukkan bahwa pembangunan *Makassar New Port* di pulau Kodingareng menyebabkan dampak ekonomi lokal berupa penurunan pendapatan nelayan di pulau tersebut dan menyebabkan kerusakan lingkungan laut dan pesisir. Sebagian besar nelayan termasuk kelompok rentan karena mereka termasuk kelompok yang memiliki pendapatan yang rendah. Berbagai studi lain menunjukkan bahwa pembangunan dan perluasan kota Makassar menyebabkan degradasi lingkungan hidup yang bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan (sustainability) pembangunan Kota Makassar (Surya et al., 2021b, 2021a, 2020a, 2020b). Satu studi dari Wisneni (Wisneni et al., 2021) yang meneliti tentang keberlanjutan program Lorong Garden Kota Makassar dari berbagai dimensi menunjukkan bahwa secara keseluruhan keberlanjutan program ini rendah sehinggamerlukan pengkajian ulang yang lebih baik untuk mencapai tujuan diadakannya program tersebut. Studi-studi yang dikutip di atas sebagian besar mencoba menghubungkan pembangunan fisik dalam hal ini infrastruktur dengan berbagai parameter keberlanjutan (sustainability) antara lain keberlanjutan ekologi/lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat.

9. Pedoman kesetaraan dan inklusivitas, USAID 2020

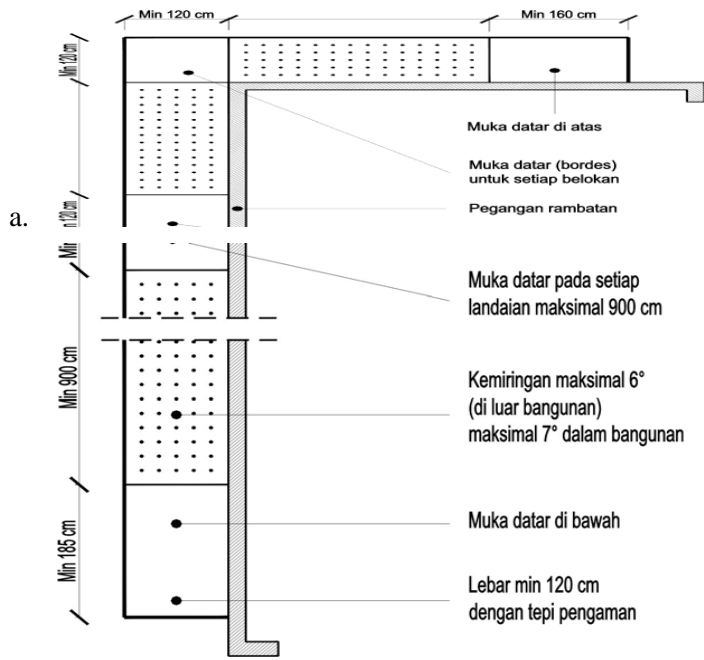
Dalam membahas akomodasi layak dan inklusivitas pada bangunan fisik, merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan Gedung dan Lingkungan.

1. Bidang miring (ram)

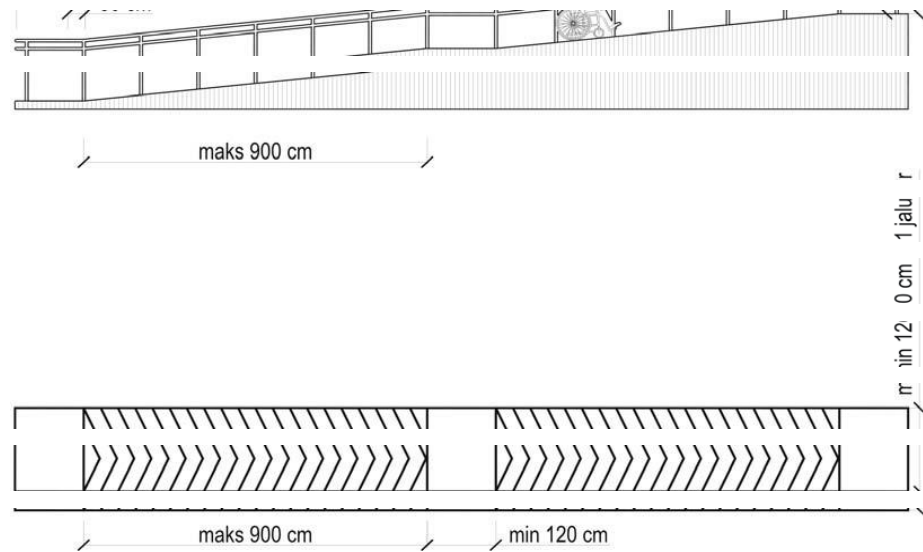
Bidang miring adalah jalur lalu-lintas orang yang memiliki kemiringan tertentu yang menjadi alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam membangun akomodasi layak berupa ram meliputi:

- a. Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7 derajat, dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaianya 1:8. Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ram. Sedangkan kemiringan suatu ram yang ada di luar bangunan maksimal 6 derajat, dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10.
- b. Panjang mendatar dari satu ram dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8 tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ram dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang;

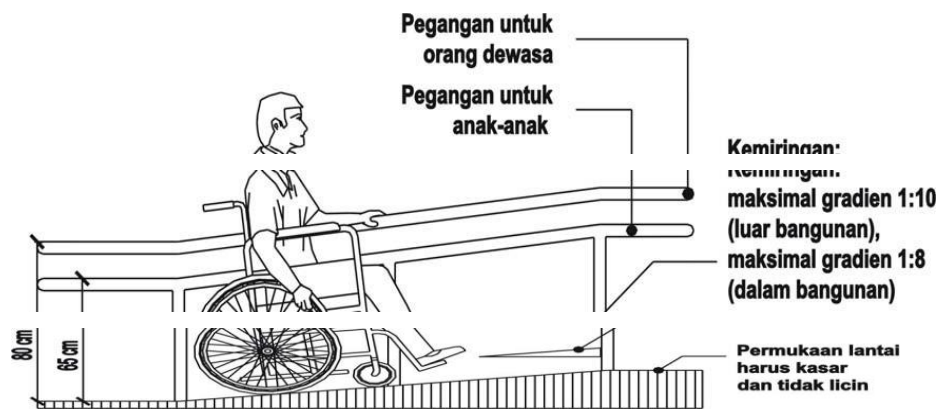
- c. Lebar minimum ram adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk ram yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang, harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ram dengan fungsi masing-masing;
- d. Muka datar atau bordes pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimal 160 cm;
- e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ram harus memiliki tekstur sehingga tidak licin, khususnya di waktu hujan;
- f. Lebar tepi pengaman ram 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda dari kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ram. Apabila berbatasan langsung dengan lalu lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum;
- g. Ram harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu pengguna ram saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ram yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian yang membahayakan; dan
- h. Ram harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 – 80 cm.



Gambar 2.1 Type RAM



Gambar 2.2 Kemiringan ram



Gambar 2.3 Handrail

2. Tangga

Tangga merupakan fasilitas pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai. Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam membangun akomodasi layak berupa tangga meliputi:

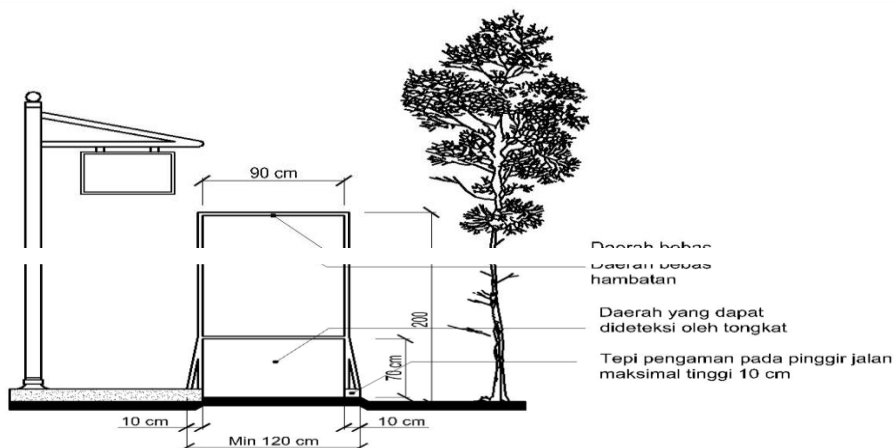
- a. Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam;
- b. Harus memiliki kemiringan tanpa kurang dari 60 derajat;
- c. Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga;
- d. Harus dilengkapi dengan pegangan rambat minimum pada salah satu sisi tangga
- e. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 – 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang;
- f. Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan Panjang minimal 30 cm;
- g. Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sedemikian rupa agar tidak ada air hujan yang menggenang di lantai.

3. Jalur Pedestrian

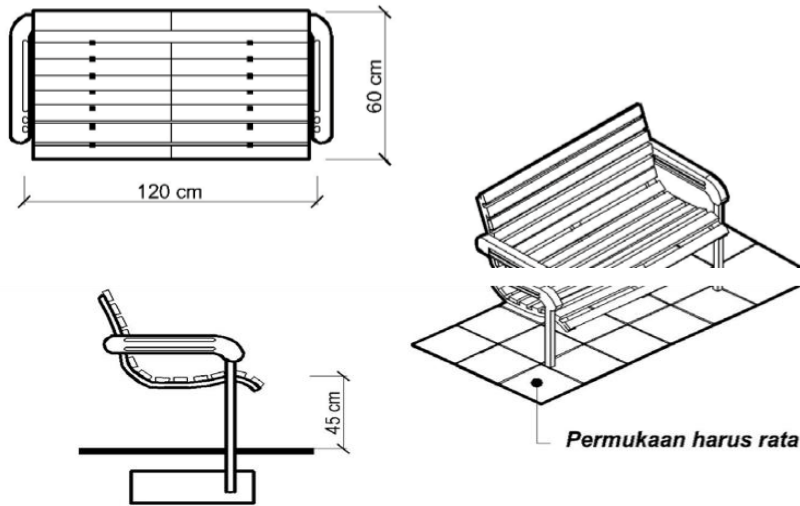
Jalur pedestrian adalah jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri, yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.

Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam membangun akomodasi layak di jalur pedestrian meliputi:

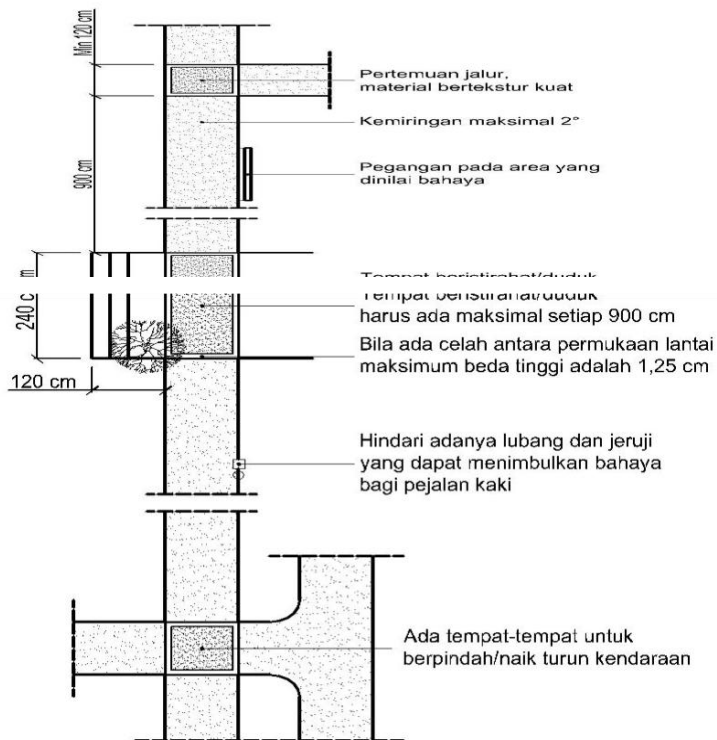
- a. Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan bertekstur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, walaupun terpaksa ada, tingginya tidak lebih dari 1,25 cm. Apabila menggunakan karpet, maka bagian tepinya harus dengan konstruksi yang permanen;
- b. Perbandingan kemiringan maksimum adalah 1:8 dan pada setiap jarak maksimal 900 cm diharuskan terdapat bagian yang datar minimal 120 cm;
- c. Area istirahat digunakan untuk membantu pengguna jalan penyandang disabilitas dengan menyediakan tempat duduk santai di bagian tepi;
- d. Pencahayaan berkisar antara 50-150 lux, tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya dan kebutuhan keamanan;
- e. Perawatan dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan;
- f. Drainase dibuat tegak lurus dengan arah jalur dengan kedalaman maksimal 1,5 cm, mudah dibersihkan dan perletakan lubang dijauhkan dari tepi bidang miring;
- g. Lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah. Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, lubang drainase atau gorong dan benda-benda lainnya yang menghalangi; dan;
- h. Tepi pengamanan penting ada bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat disabilitas netra. Tepi pengamanan dibuat setinggi maksimum 10 cm dan lebar 15 cm ke arah yang berbahaya.



Gambar 2.4 Penempatan Pohon, Rambu dan Street Furniture



Gambar 2.5 Prinsip Perencanaan Jalur Pedestrian



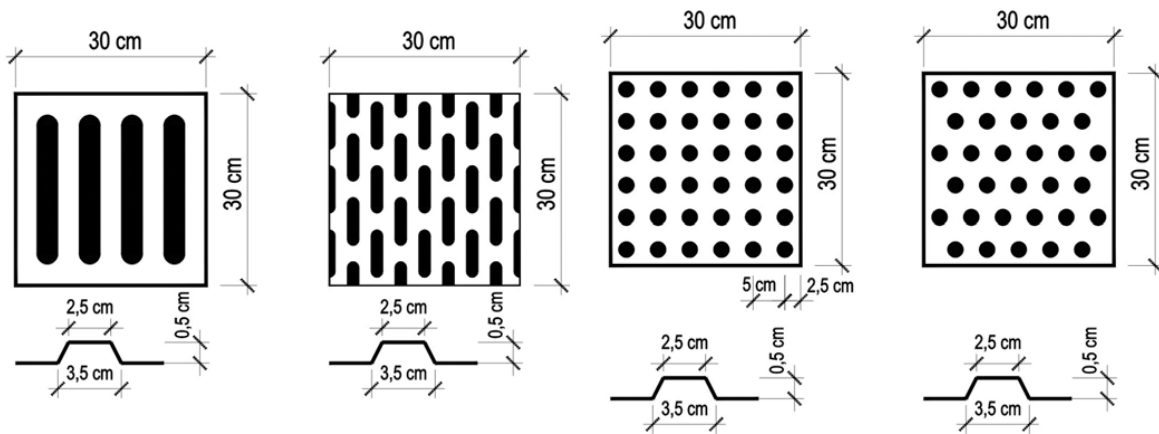
Gambar 2.5 Prinsip Perencanaan Jalur Pedestrian

4. Jalur Pemandu

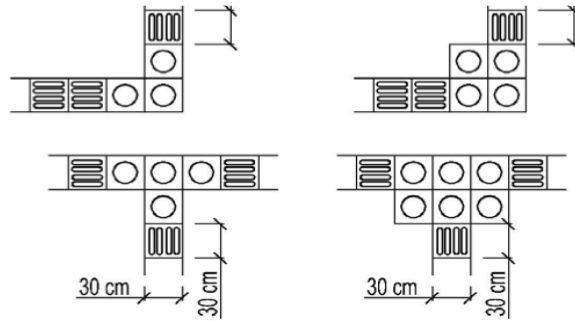
Jalur pemandu adalah jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam membangun akomodasi layak berupa jalur pemandu meliputi:

- Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan;
- Tekstur ubin peringatan bermotif bulat memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;
- Area yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu: 1) Depan jalur lalu lintas kendaraan; 2) Depan pintu masuk atau keluar dari tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai; 3) Pintu masuk atau keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang; 4) Pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan; dan 5) Pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat;
- Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin yang telah ada, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan; dan
- Memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, misalnya dengan ubin pemandu berwarna kuning atau jingga



Gambar 2.6 Tipe Tekstur Ubin Pemandu (Guiding Block)



Gambar 2.7 Susunan Ubin Pemandu pada Belokan

5. Tempat Ibadah

Tempat ibadah merupakan fasilitas untuk menunaikan kewajiban beribadah sesuai dengan aturan dan tata cara masing-masing pemeluk agama. Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam membangun akomodasi layak berupa tempat ibadah meliputi:

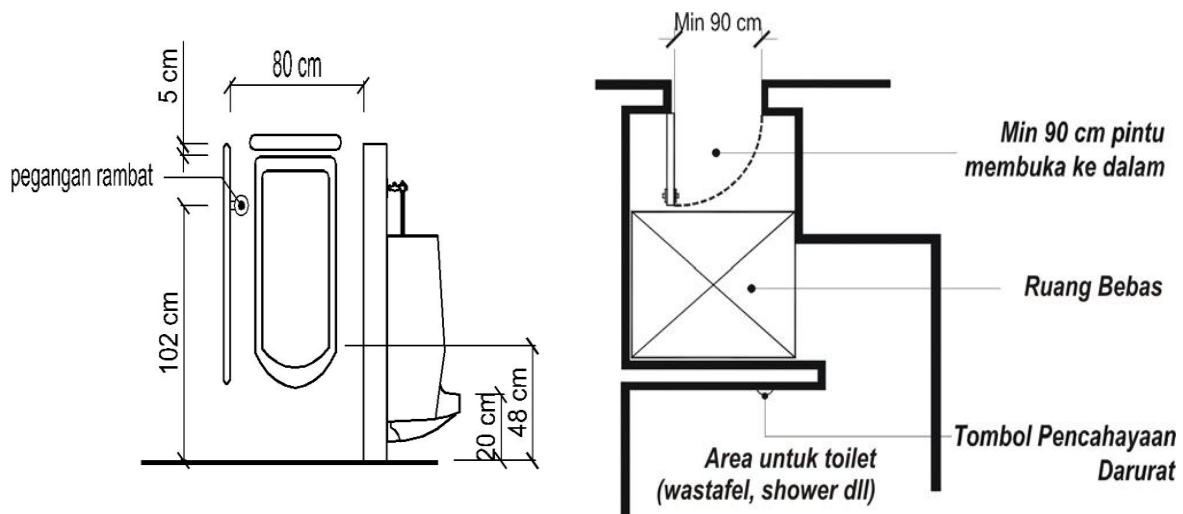
- Pengelola tempat ibadah di perusahaan harus memiliki peraturan tertulis yang memperbolehkan orang dengan kursi roda masuk kedalam tempat ibadah
- Jalan menuju pintu masuk tempat ibadah harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk pengguna kursi roda dan disabilitas netra;
- Semua kran sebaiknya menggunakan sistem pengungkit;
- Tempat ibadah harus dilengkapi pegangan tembok;
- Penyediaan layanan dukungan dalam beribadah, seperti penerjemah yang membantu penyandang disabilitas tuli bisa memahami materi edukasi keagamaan; dan
- Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

6. Toilet

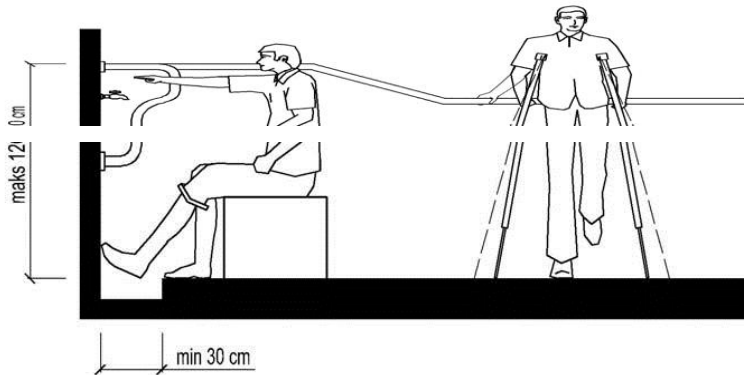
Toilet atau kamar kecil di tempat kerja merupakan fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak dan Lansia. Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam membangun akomodasi layak berupa toilet meliputi:

- Toilet dilengkapi dengan tampilan rambu atau simbol dengan sistem cetak timbul untuk penyandang disabilitas pada bagian luarnya;
- Toilet harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar bagi pengguna kursi roda;

- c. Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm;
- d. Toilet harus dilengkapi dengan pegangan rambat yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda;
- e. Semua kran sebaiknya dengan menggunakan sistem pengungkit;
- f. Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin;
- g. Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda;
- h. Kunci-kunci toilet dan gerendel dipilih yang bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat; dan
- i. Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.



Gambar 2.8 Perletakan Uriner



Gambar 2.9 Kran Wudhu bagi penyandang disabilitas dan lansia

7. Rambu atau Marka

Rambu dan marka adalah fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat informasi dan komunikasi multimedia bagi penyandang disabilitas.

Persyaratan:

a. Penggunaan rambu terutama dibutuhkan pada:

- 1) Arah dan tujuan jalur pedestrian
- 2) Kamar mandi atau toilet
- 3) Parkir khusus penyandang disabilitas;
- 4) Nama fasilitas dan tempat ATM dan Telepon;

b. Persyaratan rambu yang digunakan

- 1) Rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh disabilitas netra dan penyandang disabilitas lainnya;
- 2) Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya;
- 3) Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional;
- 4) Rambu yang menerapkan metode khusus;
- 5) Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau. Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya;
- 6) Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3:5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1:5 dan 1:10; dan

- 7) Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca.

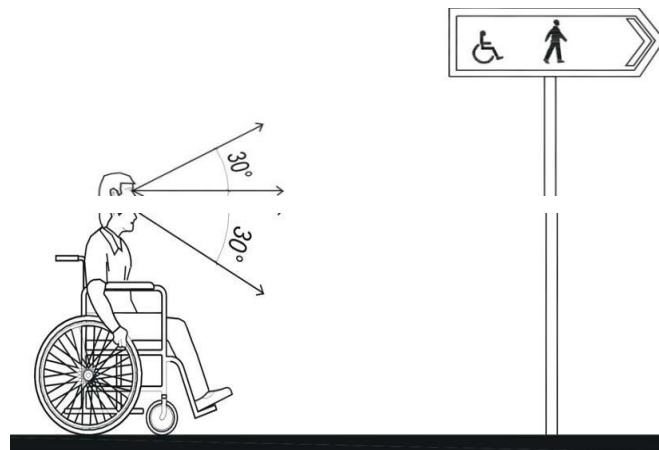
8. Jenis rambu dan marka

a. Alarm lampu darurat disabilitas tuli, diletakkan di atas pintu atau lift;

- 1) Audio untuk disabilitas tuli, diletakkan di dinding utara-barat- timur-selatan pada ruangan pertemuan, seminar, konferensi, dan lain-lain;
- 2) Fasilitas *teletext* atau teks televisi untuk disabilitas tuli, diletakkan atau digantungkan pada pusat informasi di ruangan lobi; dan
- 3) Fasilitas bahasa isyarat diletakkan di loket, meja informasi, dan/ atau pos satuan pengaman yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.

b. Lokasi penempatan rambu

- 1) Penempatan yang sesuai dan bebas pandang tanpa penghalang;
- 2) Satu kesatuan sistem dengan lingkungannya;
- 3) Cukup mendapat pencahayaan; dan
- 4) Tidak mengganggu arus pejalan kaki dan sirkulasi (buka-tutup, dan lain-lain)



Gambar 2.10 Perletakan Rambu Sesuai Jarak dan Sudut Pandang

10. Universal Design

Menurut Story, Mueller, dan Mace (The Universal Design File, 1998), desain universal (universal design) adalah konsep desain untuk memenuhi kebutuhan semua individu, tanpa memandang usia, kemampuan, ataupun status penggunanya. Desain universal berakar dari desain bebas hambatan (barrier-free design) yaitu pendekatan desain yang dapat diakses dengan mudah. Istilah desain universal dapat dikenal juga sebagai desain yang cukup adil. Hal tersebut karena perancang harus mengatasi masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan harus menunjang masyarakat luas agar ruang dapat digunakan oleh semua individu dan tanpa perlu adaptasi khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Berikut adalah 7 prinsip desain universal, antara lain:

Tabel 2.3 Tujuh (7) Prinsip Universal Design

| No | Prinsip | Definisi | Pola Konteks Universal Design |
|----|--|---|--|
| 1 | Penggunaan yang adil | Desain ditujukan untuk beragam individu dengan beragam kemampuan | Membuat bangunan, ruang publik, dan fasilitas publik seperti jalur pedestrian, jalan setapak, dan taman yang dapat diakses secara universal oleh semua kelompok individu |
| | Fleksibilitas dalam penggunaannya | Desain dapat mengakomodasi berbagai preferensi dan kemampuan individu | Ruang publik yang bisa digunakan untuk lebih dari satu tujuan seperti pertemuan komunitas atau pertunjukan seni, dan sebagainya |
| | Penggunaan yang sederhana dan intuitif | Desain harus mudah dimengerti terlepas dari pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan bahasa penggunanya | Jaringan jalan berbentuk pola aliran sederhana agar dapat diakses dengan mudah |

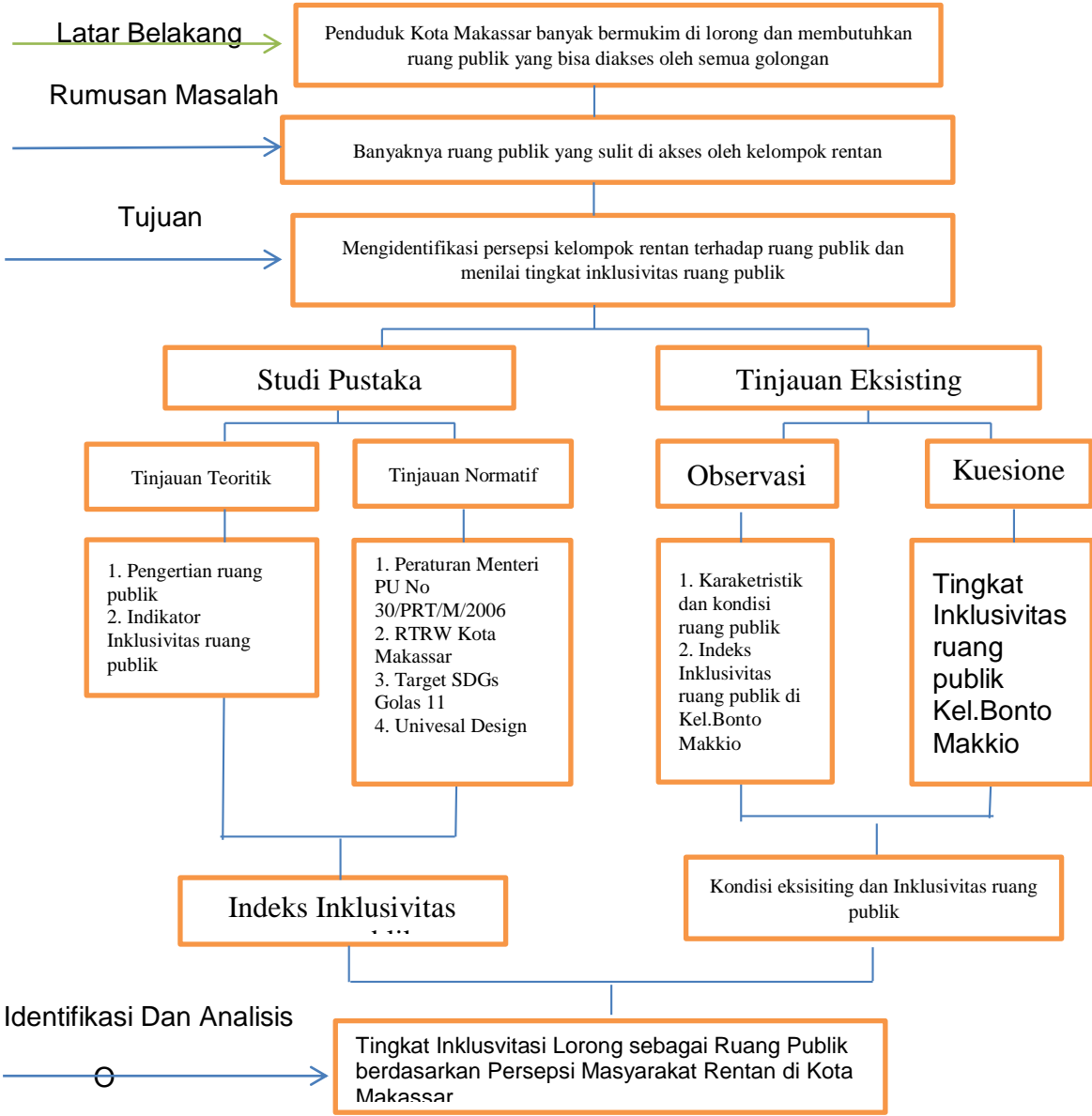
| | | |
|------------------------------|--|---|
| Informasi yang jelas | Desain harus mencakup informasi secara efektif untuk digunakan sebagai alat komunikasi dengan pengguna ruang, terlepas dari kondisi sekitar atau kemampuan sensor pengguna | Signage atau penandaan yang dapat dibaca dengan jelas dan ditempatkan di titik-titik yang sering dilalui oleh masyarakat |
| Toleransi terhadap kesalahan | Desain harus bisa meminimalkan bahaya dan konsekuensi buruk dari kecelakaan atau ketidaksengajaan dalam penggunaan ruang | Peningkatan keamanan dengan membuat pengaman antara jalur pedestrian dengan jalur kendaraan |
| Upaya fisik rendah | Desain harus bisa digunakan secara efisien dan nyaman dengan tidak menyebabkan upaya fisik yang berlebihan | Jalur pedestrian terawat dengan baik tanpa kerusakan material, tepi jalur pedestrian halus dan terlihat dengan jelas |
| Ukuran ruang untuk pengguna | Ukuran yang sesuai terhadap penggunaan ruang oleh berbagai individu, terlepas dari ukuran tubuh, postur tubuh, atau mobilitas pengguna | Menghindari desain bangunan yang dapat menghalangi jarak pandang pada jalan; lebar jalur pedestrian dapat mengakomodasi pejalan kaki dengan bermobilitas tinggi |

Sumber : *universal Design Handbook, Wolfgang*

2.3 Kerangka Pikir

Adanya peraturan UUD No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana setiap perkotaan harus menyediakan ruang publik baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau. Untuk Kota Makassar terkait ruang publik masih sangat terbatas mengingat terbatas lahan

yang ada di sekitar wilayah pemukiman. Banyak masyarakat yang bermukim di lorong menjadikan lorong sebagai salah satu alternatif yang berfungsi sebagai ruang publik. Oleh karena hal tersebut perlu adanya ruang terbuka publik yang mendukung interaksi sosial, budaya yang ramah untuk semua kalangan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana fungsi lorong sebagai ruang publik serta mengukur bagaimana tingkat inklusivitas lorong sebagai ruang publik yang ada di wilayah Kota Makassar khususnya Lokasi penelitian di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini



Gambar 2.11 Kerangka Pikir